

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN SELUMA

Yulian Ansori

Kementerian Agama Kabupaten Seluma
Email: julianansori@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma telah berjalan dimana Pemerintah daerah melalui FKUB dan Kesbangpol menerapkan peraturan pendirian rumah ibadah dengan prosedur yang telah ditetapkan. Faktor pendukungnya yaitu dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam pendirian rumah ibadah dan adanya sikap toleransi beragama. Sedangkan yang menjadi penghambat yaitu sering terjadinya manipulasi data penduduk yang menjadi syarat dalam pendirian rumah ibadah dan persoalan teologi, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan, adanya kepentingan politik, muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antara agama.

Kata Kunci: *Pendirian rumah ibadah, kerukunan umat beragama*

Abstract: This research describes the Implementation of Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9 and 8 of 2006 on Establishment of Houses of Worship in Seluma District. This research method using qualitative method. The result of this research can be concluded that Implementation of Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs Number 9 and 8 Year 2006 Concerning Establishment of House of Worship in Seluma District has been run where local Government through FKUB and Kesbangpol apply the rules of establishment of house of worship with established procedure. The supporting factor is that the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9 and 8 of 2006 can be a reference for the community in the construction of houses of worship, and the attitude of religious tolerance. While the obstacles are often the manipulation of population data that is a requirement in the construction of houses of worship and theological issues, so that religious people feel reluctant to discuss matters of faith, the existence of political interests, emerging political turmoil that helped influence the relationship between religion.

Keywords: *Establishment of houses of worship, religious harmony*

Pendahuluan

Dasar hukum konstitusi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.¹

Upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan orde baru, pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan. Selanjutnya disempurnakan isinya dan tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Macam-macam agama yang ada khususnya di Indonesia, menjadikan hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan. Setiap agama memang memiliki perbedaan, sehingga dibutuhkan suatu hal untuk menyatukan perbedaan tersebut. Titik tengah persoalan akibat dari perbedaan ini adalah pemerintah yang merupakan pihak yang paling utama dalam hal pelaksanaan pemerintahan atau sistem pemerintahan yang ada didalamnya, baik itu dalam hal agama, pembangunan, peraturan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Peran penting pemerintah adalah melayani setiap kebutuhan masyarakat dengan mewujudkan demokrasi khususnya dalam hal keyakinan. Tidak kalah penting dengan peran pemerintah, toleransi antar umat beragama pun menjadi suatu titik hak kebebasan beragama dapat benar-benar terealisasi.

Toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Toleransi ada karena adanya kebebasan dan kebebasan ada karena adanya toleransi. Toleransi dan kebebasan adalah syarat mutlak bagi masyarakat plural maupun homogen, demi terciptanya masyarakat yang dinamis dan kondusif. Kebebasan berfikir, memilih, dan berkarya hanya mungkin terjadi ketika masyarakat dalam suatu bangsa siap untuk menerima perbedaan (toleran) serta mengakui bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan tidak bisa dipaksakan.²

Toleransi adalah keyakinan bahwa seseorang tidak boleh campur tangan terhadap perilaku atau tindakan yang tidak dia setujui. Cirinya ialah: ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu dan penolakan untuk memaksakan pandangannya sendiri terhadap orang lain. Menurutny, seseorang tidak bisa dianggap toleran terhadap sesuatu yang ia setujui. Sedangkan kebebasan ialah, seseorang mampu memilih bertindak tanpa campur tangan orang lain. Di Negara Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan etnis masih diperhadapkan dengan sikap toleransi yang rendah pada masyarakatnya. Diberbagai tempat juga masih banyak terjadi kekerasan bernuansa agama dan itu semua akibat dari sikap yang tidak mau menerima perbedaan.

Masalah yang sering mengusik kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma adalah masalah pendirian rumah ibadah. Antara lain di Desa Pagar Agung Seluma Barat dan Kelurahan Talang Saling Seluma Kota. Di lingkungan mayoritas muslim ada usaha pembangunan gereja, berdasarkan observasi sementara, menurut beberapa informan dari beberapa anggota masyarakat setempat penduduk Kristen yang ada di sekitar bukanlah umat yang akan dilayani oleh gereja yang akan dibangun. Sedangkan jemaat gereja

¹Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Ali Nurdin. *Qur'anic Societi* menelusuri konsep masyarakat yang ideal dalam Al-Qur'an. Jakarta. Erlangga. 2006: h. 157

yang tinggal di lingkungan tempat pembangunan gereja itu hanya beberapa keluarga saja. Pembangunan gereja ini belum mendapatkan izin dan mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena tidak mendapat izin bangunan. Mereka berharap peran pemerintah setempat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya tokoh atau pemuka agama dituntut untuk ikut serta memecahkan permasalahan yang terjadi dengan mewujudkan berbagai kepentingan yang terkait dengan masalah tersebut.³

Izin mendirikan bangunan rumah ibadah yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadah, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadah. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 13.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma?

Metode Penelitian

Penelitian ini penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Menurut Anselm, penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁵

Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan

penelitian lapangan (field research) sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian dan karakteristik tentang Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma.

Landasan Teori

Izin Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia

Izin mendirikan bangunan rumah ibadah yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadah, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadah. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- b. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

³Hasil observasi dan wawancara dengan Aidi Muksin, tanggal 2 April 2018 di Kabupaten Seluma.

⁴Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Grafindo Persada. 2004. h. 4.

⁵Anselm, Juliet Corbin. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Jakarta. Pustaka Pelajar. 2009: h. 4.

Persyaratan khusus khususnya syarat minimal 90 orang pengguna rumah ibadah menunjukkan Perber ini lebih mementingkan kuantitas/jumlah pengguna rumah ibadah, dan ini lebih menguntungkan kelompok mayoritas agama di mana pun berada di seluruh wilayah Indonesia. Karena kelompok mayoritas keagamaan di suatu wilayah akan dengan mudah memperoleh 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Sementara kelompok minoritas keagamaan pasti akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Di sinilah terletak diskriminasi dalam bentuk perbedaan perlakuan khususnya terhadap kelompok minoritas keagamaan. Perber menjerjermahkan keperluan nyata dan sesungguhnya dengan kuantitas pengguna rumah ibadah dan dukungan masyarakat setempat. Sehingga ketentuan ini bertentangan dengan kewajiban positif negara untuk melindungi, memahami kebijakan rumah ibadah secara efektif, layak dan tepat.

Pembahasan

Dari hasil penelitian ini Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Seluma telah dilakukan. Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Seluma telah mengikuti ketentuan yang dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan dibuat dengan cara yang benar sesuai PBM harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan antar sesama lembaga pemberi rekomendasi FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma harus

menjalankan tugasnya masing-masing secara independen, tidak main mata sehingga pemerintah memperoleh masukan yang benar.

Menurut penulis pemerintah daerah Kabupaten Seluma telah melakukan tugas penertiban pendirian rumah ibadah, mereka merekomendasi dalam rapat kesbangpol dan FKUB, kemudian kunjungan ke lapangan pendirian rumah ibadat. Kemudian memeriksa segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri antar sesama lembaga pemberi rekomendasi.

Kesulitan mendirikan rumah ibadah di kabupaten Seluma tak hanya dialami satu agama saja. Hampir seluruh agama pernah mengalami sulitnya mendirikan rumah ibadah. Biasanya, persoalan yang muncul dalam sulitnya pendirian rumah ibadah adalah masalah penerimaan masyarakat di sekitar rumah ibadah. Apabila mayoritas warga di sekitar rumah ibadah beragama yang sama dengan jamaah rumah ibadah itu, pendiriannya tak akan terlalu sulit. Namun bila jamaah rumah ibadah itu beragama minoritas dengan masyarakat sekitar, pendirian rumah ibadah bisa lebih sulit. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah kerap kali berujung pada kekerasan, penyerangan dan penyegelan rumah ibadah oleh masyarakat sekitar atau aparat setempat.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, mendirikan rumah ibadah memang harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung serta beberapa persyaratan khusus. Dalam Pasal 14 peraturan itu disebutkan pendirian rumah ibadah harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang, adanya dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa, serta mendapatkan rekomendasi tertulis dari kantor kementerian agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Selain rumah ibadah, regulasi itu juga mengatur tentang pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara.

Pasal 18 peraturan itu menyebutkan pemanfaatan sementara bangunan sebagai rumah ibadah harus mendapatkan izin dari bupati/wali kota. Izin dari bupati/wali kota dapat dikeluarkan bila memenuhi persyaratan laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat meliputi izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota dan kantor departemen agama kabupaten/kota.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan antarumat beragama. Yang diatur dalam peraturan itu hanya masalah kerukunan umat beragama dan tempat ibadah. Soal kegiatan ibadah tidak diatur sehingga peraturan itu menjadi multitafsir dan bisa menimbulkan kesalahpahaman.

Soal kerukunan umat beragama dan rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Itu sebenarnya kesepakatan semua majelis agama yang kemudian dituangkan sebagai peraturan. Masyarakat supaya mematuhi aturan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan. Ibadah bersama di rumah boleh dilakukan sepanjang itu insidental. Kalau mendatangkan jamaah yang banyak dan dilakukan rutin terus menerus, tentu harus di rumah ibadah. Kalau seperti tahlilan atau doa memperingati kenaikan Isa Almasih yang insidental, bisa dilakukan di rumah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang

Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah menyatakan rumah dapat digunakan sebagai tempat ibadah keluarga. Selama ini umat Muslim juga menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, pengajian, zikir dan kegiatan majelis taklim lainnya dan tidak ada masalah.

Di antara masalah yang sering muncul di sekitar pendirian rumah ibadah ialah penggu-naan rumah tinggal sebagai tempat kebaktian bersama secara rutin tanpa izin, pembangunan rumah ibadat tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), dan tanpa rekomendasi dari FKUB. Kes-ulitan lainnya ialah pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas, arogansi pemban-gun rumah ibadat yang dipaksakan kalangan minoritas tanpa prosedur sesuai PBM, tanda tangan persyaratan dukungan pendirian rumah ibadat dan surat dari pemerintah setempat yang tidak kuat. Penolakan pembangunan rumah ibadat atau pencabutan IMB oleh pemerintah daerah dengan alasan dan pertimbangan kere-sahan dan gangguan ketertiban masyarakat.

Pengurus FKUB Kabupaten Seluma telah melakukan dialog dengan mengambil bentuk dialog perseorangan antar sesama anggota FKUB itu sendiri dalam berbagai kesempatan interaksi antar sesama mereka maupun dengan masyarakat. Dialog yang dilakukan FKUB Kabupaten Seluma merupakan upaya untuk menjembatani persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya berkenaan dengan permasalahan kerukunan umat beragama. Perlu adanya standar yang bisa diterima semua pihak. Dengan kata lain, perlu ada standar universal untuk semua pihak. Standar itu hendaknya bermuara pada moralitas atau etika, yaitu hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, keadilan dan perdamaian.

FKUB Kabupaten Seluma telah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut penulis, seharusnya kegiatan keagamaan jangan dicampuradukan dengan kepentingan, FKUB Kabupaten Seluma harus menegaskan keberadaannya sebagai berwujudan dari aspirasi luhur aga-

ma-agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, dan harus dicegah penyalahgunaan atau pemanfaatan FKUB untuk kepentingan politik.

FKUB Kabupaten Seluma telah melakukan sosialisasi peraturan-perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Namun hal tersebut masih belum maksimal dilakukan karena kepengurusan FKUB yang baru dibentuk.

Menurut penulis jalan keluarnya adalah FKUB harus meningkatkan peran sosialisasi PBM kepada masyarakat dan peningkatan kepekaan aparat pemerintah untuk merespon secara cepat setiap laporan dan masukan dari masyarakat. Walaupun dalam siklus pergantian kepengurusan FKUB dan sosialisasi isi PBM sudah dilakukan mungkin berpuluh kali oleh fungsionaris FKUB, dan hal ini menjadi perhatian pertama bagi para pengurus FKUB dan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

FKUB Kabupaten Seluma dan tokoh agama telah melakukan kewajibannya sebagai utusan tokoh agama yang harus menormalisir keadaan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab FKUB Kabupaten Seluma, camat, lurah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tokoh agama/tokoh masyarakat setempat. Hasil identifikasi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kerawanan dituangkan dalam laporan singkat, ditanda tangani oleh tokoh masyarakat setempat.

Masalah kerukunan intern umat beragama merupakan masalah ideologi. Oleh karena itu, FKUB dan pemerintah tidak punya hak mengatur dogma/ajaran dari setiap agama, karena negara kita bukan negara agama, hal itu adalah hak koridor masing-masing agama. Peran FKUB dan pemerintah adalah sebagai fasilitator melindungi semua agama agar terjamin menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu FKUB dan pemerintah

mengharapkan adanya suatu sinergitas dan kemitraan dari tokoh agama untuk berperan membina dan mengembangkan sikap kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan kerukunan intern umat beragama.

Peranan yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan sikap toleransi dan keharmonisan serta kerukunan hidup beragama adalah para pimpinan umat, tokoh yang berperan langsung dengan umat. Sikap keteladanan dan kepemimpinan menjadi cermin bagi umat, khotbah, ceramah agama dan materi-materi pembinaan harus menyentuh pada pola sikap dan perilaku umat untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga antar umat beragama terbangun dan terpelihara kerukunan, keharmonisan dan toleransi beragama yang hakiki.

Peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan beragama di Kabupaten Seluma, jika tanpa didukung oleh para pimpinan umat beragama, maka peraturan itu tidak punya arti/manfaat apa-apa di tengah masyarakat.

Menurut hemat penulis, upaya FKUB Kabupaten Seluma dalam membina kerukunan antar umat beragama dengan mengajak semua agama untuk bersikap toleransi antar umat beragama, lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Walaupun sampai sekarang ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan radikalisme terhadap agama yang lain, sulitnya mendapatkan izin pendirian rumah ibadah dari kelompok agama yang lain, masih memiliki sikap mayoritas dan minoritas, sikap curiga antar kelompok agama.

Agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan tetap terpelihara Pemerintah tidak mencampuri masalah Akidah, dalam memberikan

bimbingan, pembinaan dan pelayanan tersebut, pemerintah sama sekali tidak mencampuri masalah akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Namun pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda di Kabupaten Seluma.

Menurut penulis peran dan upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak baik umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, dan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak dapat berperan aktif dan melakukan upaya tersebut dengan maksimal, maka kerukunan hidup antar umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap terpelihara. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Pemerintah dalam batas dan kemampuannya yang ada bertugas mengadakan fasilitas kehidupan beragama antara lain berupa rumah-rumah ibadah, kitab-kitab suci, penataran dan peningkatan mutu bagi petugas-petugas/rohaniawan-rohaniawan yang ada. Pengadaan sarana-sarana tersebut disamping membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk tempat ibadah dan kitab-kitab suci, juga diarahkan untuk membimbing dan merangsang para pemeluk agama untuk mengadakan sendiri kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Oleh sebab itu, jika terjadi sesuatu yang menyimpang dari prinsip umum ini maka FKUB dan semua pihak akan segera duduk bersama mencari solusinya. Semua pihak sepakat bahwa sekecil apapun konflik bernuansa agama yang terjadi, harus segera dilokalisir, diredam, dan dipadamkan untuk kemudian dibangun di atasnya jaringan persahabatan dan kerjasama.

Diantara masalahnya terkadang adalah karena sebagian majelis itu sendiri tidak dapat mengklaim mewakili seluruh lapisan umat beragama yang dipimpinnya, karena banyaknya variasi umat di dalamnya. Kita mengetahui didalam umat Islam yang diwakili MUI, di kalangan Kristen Protes-

tan yang diwakili PGI, umat Hindu yang diwakili PHDI, dan umat Budha yang diwakili Walubi.

Jadi, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Dari beberapa hasil penelitian bahwa faktor pendukung dalam pendirian rumah ibadah dan membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas FKUB. Bila dilihat secara umum ada beberapa faktor pendukung dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma yaitu sarana dan prasarana, sikap pluralisme, dan sikap toleransi beragama.

Menurut penulis pluralisme agama harus ditanamkan mulai dari unsur pemerintah hingga masyarakat di kabupaten Seluma, karena pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Tapi persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Sikap toleransi beragama, kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.

Pemerintah daerah di Kabupaten Seluma harus menanamkan sikap toleransi beragama, karena toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, contohnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang

benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Salah satu masalah yang menjadi penghambat dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma sekarang ini, khususnya menyangkut persoalan teologi agama yang sensitif. Sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan.

Sikap fanatisme terhadap agama bukan saja pada umat muslim, akan tetapi juga pada agama lain, sikap semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu. Islam misalnya, juga memiliki agen-agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan.

Faktor penghambat implementasi PMB di Kabupaten Seluma bila dilihat secara umum ada beberapa faktor penghambat dalam pendirian rumah ibadah dan membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Seluma yaitu sering terjadinya pemalsuan data warga yang akan membangun rumah ibadah, persoalan teologi, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan, tidak melakukan dialog yang lebih mendalam, karena baik pihak yang berbeda keyakinan sama-sama menjaga jarak satu sama lain, adanya kepentingan politik, muncul kekacauan politik yang ikut memengaruhi hubungan antaragama dan dapat menjadi hambatan dalam membina kerukunan antar agama, karena sangat sulit membangun kerukunan umat beragama, apalagi timbulnya konflik.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun

2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma telah dilakukan. Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Seluma telah mengikuti ketentuan dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan dibuat dengan cara yang benar sesuai PBM harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan survey lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan antar sesama lembaga pemberi rekomendasi FKUB.
2. Faktor pendukung Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Seluma yaitu adanya sikap pluralisme agama dan toleransi beragama. Sedangkan yang menjadi penghambat yaitu sering terjadinya manipulasi data penduduk yang menjadi syarat dalam pendirian rumah ibadah dan persoalan teologi, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. adanya kepentingan politik, muncul kekacauan politik yang ikut memengaruhi hubungan antaragama.

Daftar Pustaka

- Ali Nurdin. Qur'anic Societi menelusuri konsep masyarakat yang ideal dalam Al-Qur'an. Jakarta. Erlangga. 2006
- Anselm, Juliet Corbin. Dasar-dasar penelitian kualitatif. Jakarta. Pustaka Pelajar. 2009
- Faisal Ismail. Sejarah, Teologi dan etika lintas agama: Islam Dalam Lintas sejarah. Interfidei.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Grafindo Persada. 2004.
- M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas dan Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
- Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat Pada Pasal
- Syahril. Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membina kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu. Pascasarjana IAIN Bengkulu Tahun 2014
- Syahrin, Teologi Kerukunan, Kencana. Jakarta. 2010